



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA
DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Seteluk Rea sebagai pemekaran dari Desa Seteluk Tengah di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Seteluk Rea terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Selayar, Dusun Pamongo dan Dusun Bda Rea dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano dan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Seteluk Tengah dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan persyaratan:
- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Perangkat Desa dari Desa Seteluk Tengah yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk ; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan APB Desa Desa induk.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.

Bagian Kedua

BPD

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang menjadi kewenangan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota BPD Seteluk Tengah yang berdomisili di Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Seteluk Rea yang menjadi kewenangan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD Seteluk Tengah sampai dengan terbentuknya BPD setelah Desa Persiapan Seteluk Rea ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat Kecamatan Seteluk; dan
 - b. Kepala Desa Seteluk Tengah.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Desa Persiapan Seteluk Rea dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Seteluk Rea.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Seteluk Rea bersumber dari APB Desa Seteluk Tengah.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari APB Desa Seteluk Tengah.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Seteluk Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari APB Desa Seteluk Tengah pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Seteluk Rea yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui APB Desa Seteluk Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TANGGAL 31 Agustus 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA
 DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**PETA BATAS DESA
 DESA PERSIAPAN SETELUK REA
 KECAMATAN SETELUK
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

LEMBANG PAKS 92.07.03.0000
 SKALA: 1:4.500



Disusun dan Menguji
 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
 Bupati Sumbawa Barat
 Bupati Sumbawa Barat

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Keterangan:
 1. Titik Koordinat
 2. Garis Koordinat Desa
 3. Garis Desa Yang Ditetapkan
 4. Desa Persiapan Seteluk Rea

Daftar Titik Koordinat dan Nomor-Titik Koordinat

No. Titik	Titik Koordinat	Nomor-Titik Koordinat
1	112° 15' 00" Bujur Timur	1
2	112° 15' 00" Bujur Timur	2
3	112° 15' 00" Bujur Timur	3
4	112° 15' 00" Bujur Timur	4
5	112° 15' 00" Bujur Timur	5
6	112° 15' 00" Bujur Timur	6
7	112° 15' 00" Bujur Timur	7
8	112° 15' 00" Bujur Timur	8
9	112° 15' 00" Bujur Timur	9
10	112° 15' 00" Bujur Timur	10
11	112° 15' 00" Bujur Timur	11
12	112° 15' 00" Bujur Timur	12
13	112° 15' 00" Bujur Timur	13
14	112° 15' 00" Bujur Timur	14
15	112° 15' 00" Bujur Timur	15
16	112° 15' 00" Bujur Timur	16
17	112° 15' 00" Bujur Timur	17
18	112° 15' 00" Bujur Timur	18
19	112° 15' 00" Bujur Timur	19
20	112° 15' 00" Bujur Timur	20
21	112° 15' 00" Bujur Timur	21
22	112° 15' 00" Bujur Timur	22
23	112° 15' 00" Bujur Timur	23
24	112° 15' 00" Bujur Timur	24
25	112° 15' 00" Bujur Timur	25
26	112° 15' 00" Bujur Timur	26
27	112° 15' 00" Bujur Timur	27
28	112° 15' 00" Bujur Timur	28
29	112° 15' 00" Bujur Timur	29
30	112° 15' 00" Bujur Timur	30
31	112° 15' 00" Bujur Timur	31
32	112° 15' 00" Bujur Timur	32
33	112° 15' 00" Bujur Timur	33
34	112° 15' 00" Bujur Timur	34
35	112° 15' 00" Bujur Timur	35
36	112° 15' 00" Bujur Timur	36
37	112° 15' 00" Bujur Timur	37
38	112° 15' 00" Bujur Timur	38
39	112° 15' 00" Bujur Timur	39
40	112° 15' 00" Bujur Timur	40
41	112° 15' 00" Bujur Timur	41
42	112° 15' 00" Bujur Timur	42
43	112° 15' 00" Bujur Timur	43
44	112° 15' 00" Bujur Timur	44
45	112° 15' 00" Bujur Timur	45
46	112° 15' 00" Bujur Timur	46
47	112° 15' 00" Bujur Timur	47
48	112° 15' 00" Bujur Timur	48
49	112° 15' 00" Bujur Timur	49
50	112° 15' 00" Bujur Timur	50
51	112° 15' 00" Bujur Timur	51
52	112° 15' 00" Bujur Timur	52
53	112° 15' 00" Bujur Timur	53
54	112° 15' 00" Bujur Timur	54
55	112° 15' 00" Bujur Timur	55
56	112° 15' 00" Bujur Timur	56
57	112° 15' 00" Bujur Timur	57
58	112° 15' 00" Bujur Timur	58
59	112° 15' 00" Bujur Timur	59
60	112° 15' 00" Bujur Timur	60
61	112° 15' 00" Bujur Timur	61
62	112° 15' 00" Bujur Timur	62
63	112° 15' 00" Bujur Timur	63
64	112° 15' 00" Bujur Timur	64
65	112° 15' 00" Bujur Timur	65
66	112° 15' 00" Bujur Timur	66
67	112° 15' 00" Bujur Timur	67
68	112° 15' 00" Bujur Timur	68
69	112° 15' 00" Bujur Timur	69
70	112° 15' 00" Bujur Timur	70
71	112° 15' 00" Bujur Timur	71
72	112° 15' 00" Bujur Timur	72
73	112° 15' 00" Bujur Timur	73
74	112° 15' 00" Bujur Timur	74
75	112° 15' 00" Bujur Timur	75
76	112° 15' 00" Bujur Timur	76
77	112° 15' 00" Bujur Timur	77
78	112° 15' 00" Bujur Timur	78
79	112° 15' 00" Bujur Timur	79
80	112° 15' 00" Bujur Timur	80
81	112° 15' 00" Bujur Timur	81
82	112° 15' 00" Bujur Timur	82
83	112° 15' 00" Bujur Timur	83
84	112° 15' 00" Bujur Timur	84
85	112° 15' 00" Bujur Timur	85
86	112° 15' 00" Bujur Timur	86
87	112° 15' 00" Bujur Timur	87
88	112° 15' 00" Bujur Timur	88
89	112° 15' 00" Bujur Timur	89
90	112° 15' 00" Bujur Timur	90
91	112° 15' 00" Bujur Timur	91
92	112° 15' 00" Bujur Timur	92
93	112° 15' 00" Bujur Timur	93
94	112° 15' 00" Bujur Timur	94
95	112° 15' 00" Bujur Timur	95
96	112° 15' 00" Bujur Timur	96
97	112° 15' 00" Bujur Timur	97
98	112° 15' 00" Bujur Timur	98
99	112° 15' 00" Bujur Timur	99
100	112° 15' 00" Bujur Timur	100

